

OPINI

# Sinergisitas bagi Pertumbuhan UMKM



Oleh: WHEDY PRASEYO\*)

DI tengah pandemi yang masih berlangsung, ekspor non-migas Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif, sejalan dengan pulihnya ekonomi dan perdagangan global. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap total ekspor tergolong masih kecil, yakni 14 persen. Persentase yang masih tertinggal dibandingkan Singapura (41 persen), Thailand (29 persen), dan Tiongkok (60 persen). Skema dorong dengan target kontribusi dalam total ekspor mencapai 21,6 persen pada 2024.

Kondisi ini diwujudkan melalui kebijakan digitalisasi, pembinaan, pendampingan, dan membangun ekosistem yang ramah dan mendukung pertumbuhan UMKM. Kebijakan tersebut terangkum dalam kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Ber-

basis Teknologi Informasi untuk mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan platform *equity crowdfunding* atau layanan urun dana berbasis teknologi untuk mengembangkan usaha.

Aturan-aturan dari OJK ataupun instansi lain seperti Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini terus diselaraskan demi memudahkan pelaku usaha dan penyelenggara urun dana berkembang. Situasi yang memberikan semangat dalam merespons kebijakan tersebut dengan mengajukan pengalangan dana kepada penyedia layanan urun dana (LUD), tidak hanya berbentuk badan hukum perusahaan terbatas, tetapi juga badan hukum koperasi. Respons sesuai dengan karakteristik UMKM yang membutuhkan pembiayaan mudah,

murah, dan cepat.

Optimisasi tersebut direspons oleh OJK bahwa hingga Juni 2021, ada empat penyelenggara LUD yang mendapatkan izin dari OJK. Masing-masing yaitu PT Santara Daya Inspiratama (Santara), PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare), PT Crowdana Teknologi Indonesia (Crowdana), serta PT Numeq Teknologi Indonesia (LandX). Keberadaan LUD yang mendapatkan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan UMKM atas kesulitan finansial.

Perkembangan yang memberikan respons bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan, karena dibandingkan dengan awal tahun 2021 yang memanfaatkan *equity crowdfunding* naik 24 persen menjadi 161 penerbit. Dana yang berhasil dihimpun naik 52 persen jadi Rp 290 miliar hingga Juni 2021.

Di sisi lain, pemodal terus bertambah sebanyak 54 persen dari tahun lalu, yaitu dari 22.000

untuk memberikan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan LUD sebagai upaya mengembangkan usahanya. Proses pengembangan untuk tidak hanya menjadi perantara bagi pelaku usaha dan pemodal, tetapi juga memberi bimbingan serta pendampingan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.

Adapun UMKM yang hendak mendapatkan dana lewat platform LUD ini setidaknya sudah menjalankan usaha 1-2 tahun terakhir. Dengan demikian, dapat dievaluasi apakah usaha ini bisa dikembangkan atau tidak. UMKM juga harus rapi dan runtut menyusun laporan keuangan yang menjadi laporan pertanggungjawaban atas kegiatan usaha. Sehingga, harapan untuk memanfaatkan LUD dapat memberikan alternatif pendanaan saat menghadapi fase *survival* (berusaha bertahan) ataupun masuk masa *recovery* (pemulihan),

dan upaya target usaha mendatang (*new normal*).

Oleh karena itu, skema dan implementasi kebijakan sebaiknya diarahkan sinergisitas pemerintah bagi pengusaha UMKM dengan membentahi infrastruktur dan pendataan. Proses ini akan memberikan ketepatan sasaran insentif dan pendampingan sebagai upaya membuka cakrawala baru ekonomi bagi UMKM, yaitu *internet platform*, *shared economy*, dan *high technology* (Martani, 2020) untuk mencapai *survival* keunggulan komparatif bagi fleksibilitas produk. Kondisi ini sesuai dengan personal UMKM yang memiliki keahlian "melirik" dan keuletan.

Namun, untuk pendanaan sebagai area kebijakan publik, sehingga ketersediaan akses, harga masuk akal, dan akuntabilitas merupakan tiga prinsip pelaksanaan *equity crowdfunding*. Model pendanaan yang tetap mengedepankan aspek

komersial, tetapi didukung oleh subsidi atas risiko bisnis sebagai "plan" menuju desain usaha *accountable*, *bankable*, dan *auditable* serta konsekuensi atas kegagalan usaha akibat *fraud* atau *shirking* (bekerja di bawah optimal).

Langkah sinergisitas untuk mewujudkan bagi penyebaran informasi tentang cara-cara baru berusaha mengunhil pejuang. Di tengah ujian yang beruntun untuk tidak hanya "berdiskusi" tentang menaikkan kelas dan memasukkan UMKM pada *on boarding* sistem teknologi pemasaran sampai transformasi digital. Pada saat yang sama, masih terdapat pelaku UMKM yang merasa berjuang sendirian tanpa peran pemerintah.

\*) Penulis adalah tenaga pendidik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive